



Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kecamatan Kabila Bone Provinsi Gorontalo

The Influence of Accountability and Internal Supervision on Bumdes Financial Management in Kabila Bone District, Gorontalo Province

Usman

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan BUMDes, seberapa besar pengaruh pengawasan Internal terhadap pengelolaan keuangan BUMDes dan seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan pengawasan Internal terhadap pengelolaan keuangan BUMDes Di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada pengelola BUMDes di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengujian uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa akuntabilitas dan pengawasan Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Dimana koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 64,3% yang berarti akuntabilitas dan pengawasan Internal mampu menjelaskan pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Kabila Bone sebesar 64,3%. sedangkan sisanya sebesar 35,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Abstract

This research aims to find out how much influence accountability has on BUMDes financial management, how much influence internal supervision has on BUMDes financial management and how big the influence of accountability and internal supervision has on BUMDes financial management in Kabila Bone District, Bone Bolango Regency. This research is quantitative research using primary data obtained from distributing questionnaires to BUMDes managers in Kabila Bone District, Bone Bolango Regency. The data analysis technique in this research uses validity, reliability, classical assumption tests and multiple linear regression tests using SPSS. Based on the research results, it was found that accountability and internal supervision had a positive and significant effect on the financial management of BUMDes in Kabila Bone District, Bone Bolango Regency. Where the coefficient of determination obtained was 64.3%, which means that internal accountability and supervision was able to explain the financial management of BUMDes in Kabila Bone District at 64.3%. while the remaining 35.7% can be explained by other variables not included in this research model.

How to Cite: Usman (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kecamatan Kabila Bone Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Bisnis (JIKABI)*, 2(2) 2023: 63-76,

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 7 Angka 1 tentang pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Pendirian BUMDes dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 2 dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2015 dinyatakan bahwa BUMDes dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan, otonomi, keterpaduan dan kooperatif.

Pentingnya penegelolaan BUMDes sebagaimana penelitian terdahulu menurut Apriliani et al (2021) bahwa dalam mengelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa harus dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangannya secara akuntabel, transparan dan wajar. Untuk itu, Badan Usaha Milik Desa harus dikelola secara benar dan professional karena harus melaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dan pengawasan intern perlu ditekankan dalam pengelolaan keuangan BUMDesa sehingga dapat mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes.

Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango terdapat Sembilan Desa, setiap Desa memiliki BUMDes. Masih terdapat Sejumlah BUMDes yang ada di Kecamatan Kabila Bone yang belum berjalan secara efektif sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamin Pou (2021) selaku Bupati Bone Bolango yang dilansir pada link <http://infopublik.id>, yang menyatakan bahwa 80% BUMDes yang ada di Kabupaten Bone Bolango termasuk di Kecamatan Kabila Bone yang bidang usahanya masih sangat terbatas yakni hanya penyewaan tenda dan kursi dan tidak memanfaatkan potensi usaha lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan oleh salah satu aparat desa dalam pra wawancara, bapak Mandra Hulopi (2021) mengatakan bahwa BUMDes yang ada di Kecamatan Kabila Bone dalam mengelola usahanya masih sangat kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya atau menghasilkan suatu produk baru sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Selanjutnya hambatan lainnya menurut Mandra Hulopi (2021) menyatakan bahwa yaitu tidak ada sumber daya yang belum cukup memadai dalam mengelola BUMDes sehingga kinerja kelembagaan tidak berjalan maksimal, demikian pula aspek kelembagaan tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap BUMDes masih sangat rendah.

Permasalahan tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya Titioka et al (2020) mengatakan bahwa Adapun hambatan yang menyebabkan pasang surutnya perkembangan BUMDes di Kabupaten Aru adalah rendahnya kapasitas manajerial, kurangnya Pemberdayaan masyarakat lokal, Infrastruktur BUMDes belum optimal serta ketersediaan sumber daya aparatur (eksekutif) untuk melakukan pendampingan dan pembinaan guna pembentukan BUMDes akibat luas laut yang menghubungkan pulau-pulau di Aru dengan faktor alam yang berisiko tinggi dan biaya transportasi yang relative sangat tinggi. Hal yang sama, dukungan permasalahan tersebut dikemukakan Sofyani et al (2020) Penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip good governance belum banyak di terapkan di BUMDes karena masih minimnya sumber daya manusia yang memadai. Seperti yang terjadi pada salah satu BUMDes di daerah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

Dari beberapa permasalahan di atas maka perlu dicarikan solusi variabel yang dapat memecahkan masalah tersebut diantaranya variabel akuntabilitas, akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (good governance) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat (Rambu Ana & Ga, 2021) . Definisi lainnya dikemukakan oleh Setiana dan Yuliani (2017) dalam Lilis Saidah Napisah & Cecep Taufiqurachman (2020), akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

Selain variabel akuntabilitas yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan BUMDes juga terdapa variabel lain yakni Variabel pengawasan internal yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau

pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat Daerah pada setiap wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia (Junaidi, 2019)

Definisi lainnya menurut Jatmiko (2020), Pengawasan internal ini diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana. Pengawasan intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Maka pada dasarnya pengawasan intern merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan. Fungsi pengawasan intern yang berjalan secara efektif dan efisien dapat mengatasi permasalahan modal dalam menjalankan usaha BUMDes dikarenakan penyertaan modal dan usaha BUMDes yang akan dijalankan telah dibahas dalam Musyawarah Desa bersama Masyarakat selaku pengawas BUMDes.

LANDASAN TEORI

Teory Stewardship

Adapun yang menjadi teori umum dalam peelitian ini adalah Teory Stewardship menggambarkan situasi dimana para abdi (steward) tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan menetapkan tujuan pada kepentingan organisasi untuk mencapai sasaran atau target yang diinginkan (Donaldson & Davis 1991) dalam (Sofyani et al., 2020).

Teori ini menggambarkan bahwa pegawai/manajer bekerja sesuai dengan kepentingan bersama. Apabila ada kepentingan antar steward yang tidak sama dengan kepentingan pemiliknya, maka steward akan memilih untuk bekerja sama dibanding menentangnya, karena steward merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Penerapan Teori stewardship digunakan karena kepercayaan dari principals yang diberiksan kepada pengurus BUMDes (Stewards) dapat terjadi jika bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pengurus BUMDes (steward) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (principal).

Konsep Pengelolaan Keuangan BUMDes

1. Pengertian BUMDes

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Menjelaskan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk besar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Humana (2018) sebagai salah satu ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lmbaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat.

2. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Menurut Humana (2018) prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk elaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, PemKab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif. Semua komponen yang terliat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungam hidup usahanya.
2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.

4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif
6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

3. Tahap-tahap pengelolaan BUMDes

Menurut Koso et al (2018) Perencanaan usaha dalam sebuah organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat di butuhkan, karena tanpa perencanaan maka suatu organisasi Badan Usaha Milik Desa tidak bisa berjalan dengan baik. Perencanaan yang telah di lakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watulaney Amian sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak di capai dan apa yang harus diperbuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam melakukan sebuah perencanaan pada awalnya tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri dengan tujuan dan sasaran yang ingin di peroleh, sebab perencanaan pada awal akan memberikan kontribusi sangat penting untuk mencapai tujuan dari berdirinya suatu organisasi tersebut dengan berbagai program yang telah direncanakan hanya satu program saja yang telah dibentuk.

Akuntabilitas

Menurut Wicaksono (2018) Akuntabilitas adalah kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Rambu Ana & Ga (2021) juga menambahkan bahwa Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut LAN dan BPKP RI (2002:2) dalam Hasanah, Nurhayati, & Purnama, (2020) terdapat beberapa indikator yang terdapat pada dimensi akuntabilitas ini, antara lain:

Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan hukum adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas kejujuran berarti penyajian informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

Kebijakan

Akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Konsep Pengawasan Intern

Pengertian pengawasan internal dalam arti luas dapat dibagi dua yaitu pengawasan administratif dan pengawasan akuntansi. Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu pimpinan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui pengawasan internal yang efektif, pimpinan lembaga pendidikan juga dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai (Fauziyah, 2017). Adapun tujuan lain dari pengawasan internal yaitu untuk memperoleh informasi yang objektif dari kegiatan yang diawasi (Amriani, 2018).

Menurut Guy (2002) dalam Fauziyah (2017), Mengidentifikasi Lima komponen pengawasan internal yang saling berhubungan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)
Menentukan kualitas entitas dengan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orang disekitarnya. Lingkungan pengendalian merefleksikan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan dewan direksi, manajemen, karyawan serta pihak-pihak lainnya mengenai pentingnya pengendalian tersebut dan penekanan yang diberikannya dalam sebuah entitas.
2. Penilaian resiko (*risk assessment*)
Semua entitas besar atau kecil, berorientasi pada laba maupun nirlaba, jasa atau manufaktur akan menghadapi resiko. Banyak dari resiko-resiko tersebut, jika tidak diantisipasi, dapat menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan entitas.
3. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*)
Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi resiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya.
4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)
Komponen ini terdiri dari sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan dan bagaimana mengkomunikasikan informasi tersebut. Sistem informasi pelaporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menyatakan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi entitas serta untuk mempertahankan akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang berkaitan.
5. Pemantauan (*Monitoring*)
Proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

Hasil akhir dari suatu pengawasan internal adalah berupa laporan yang ditujukan kepada pimpinan organisasi. Laporan dari bagian pengawasan internal merupakan suatu alat komunikasi yang didalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, luas pemeriksaan, batasan yang dibuat dan juga saran atau rekomendasi kepada pimpinan organisasi. Di samping itu laporan menjadi penting karena dapat dijadikan referensi berharga mengenai pekerjaan pemeriksaan untuk pemeriksaan selanjutnya di masa yang akan datang.

Kerangka Berpikir

Untuk dapat meningkatkan pengelolaan keuangan BUMDes diperlukan dua variabel yakni variabel akuntabilitas dan pengawasan intern.

Terdapat Pengaruh Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan BUMDes

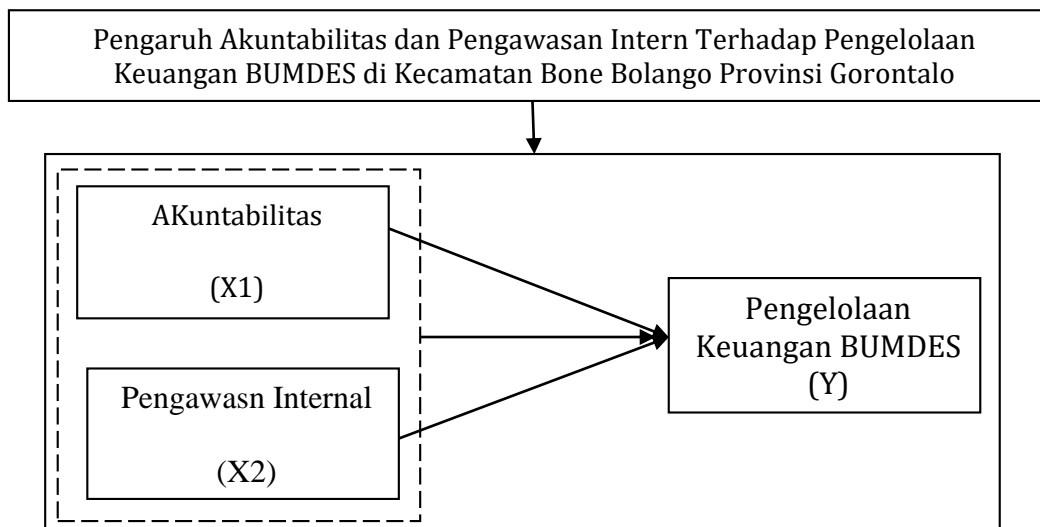
Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas di BUMDes Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango belum cukup baik dikarenakan untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas maka sumber daya manusia yang bekerja di BUMDes harus memiliki kompetensi atau kemampuan yang baik karena Pengelolaan BUMDes yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Terdapat Pengaruh Pengawasan Internal dengan Pengelolaan keuangan BUMDes

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. (Junaidi, 2019). Fungsi pengawasan intern yang berjalan secara efektif dan efisien dapat mengatasi permasalahan modal dalam menjalankan usaha BUMDes dikarenakan penyertaan modal dan usaha BUMDes yang akan dijalankan telah dibahas dalam Musyawarah Desa bersama Masyarakat selaku pengawas BUMDes.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu, (Apriliani et al (2021) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian lainnya yaitu menurut (Rambu Ana & Ga, 2021) bahwa BUMDes Ina Huk belum menerapkan Akuntabilitas dan Tranparansi dalam pelaporan keuangannya, hal ini dikarenakan laporan keuangan yang dibuat belum sepenuhnya memenuhi standar laporan keuangan SAK EMKM.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa yang ada di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2021.

Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi konseptual dan pengukuran variabel

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel Terikat Dependen (Y)

Menurut Kuncoro (2003:26) variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang jadi perhatian utama dalam suatu pengamatan. Pengamatan akan bisa mendeteksi variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang akan terjadi setelah itu. Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan BUMDes.

2. Variabel Bebas/Independen (X)

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang bisa mempengaruhi perubahan pada variabel terikat (dependent variable) dan memiliki pengaruh positif maupun negatif untuk variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent variable).

1. Akuntabilitas (X1)

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu.

2. Pengawasan Intern (X2)

Pengawasan intern adalah upaya yang dilakukan oleh pihak organisasi untuk menetapkan kinerja agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional variabel adalah batasan pengertian tentang variabel penelitian yang didalamnya sudah mencerminkan indikator- indikator yang akan digunakan untuk mengukur

variabel yang bersangkutan. Berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini, akan dirumuskan kedalam masing-masing indikator yang merupakan ciri-ciri dari variabel tersebut.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya sekedar orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya jumlah yang ada pada objek/subjek yang diteliti, akan tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut (Sugiyono, 2016, hal. 80). Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh pengurus BUMDes dari 9 pemerintah desa yang berada di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango yang berjumlah 63 orang.

2. Sampel

Penelitian bisa dinamakan sebagai penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan jika populasi yang ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian di semua populasi yang ada, sehingga dibentuklah sampel yang nantinya dijadikan sebagai perwakilan dari populasi yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel jenuh dimana semua populasi digunakan sebagai sampel dengan jumlah 63 orang. Alasan peneliti mengambil teknik sampel jenuh dikarenakan jumlah populasi yang cenderung relatif kecil dan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang populasi.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif sebab data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angka-angka serta analisis yang dilakukan menggunakan statistik dengan tujuan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini tergolong penelitian kausal komparatif. Studi kausalitas adalah penelitian yang mengarah pada hubungan antara setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan mengukur kekuatan hubungan dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data Primer. Menurut Hardani et al (2020) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan yang diteliti. Data primer bisa diperoleh dengan beberapa cara misalnya kuisisioner, observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini meliputi dari jawaban responden yang didapatkan melalui penyebaran kuisisioner sebagai instrumen penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada para responden untuk dijawab. Kuesioner dilengkapi dengan petunjuk pengisian. Alasan menggunakan kuesioner adalah peneliti berpendapat bahwa yang sangat memahami akan persepsi atau yang lainnya terhadap sesuatu ialah diri sendiri. Dengan hal ini, peneliti berharap persepsi yang dimiliki oleh masing-masing responden dapat dituangkan dalam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistical Package For Sosial Science), yang dimana sebagai program komputer). Adapun analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk menentukan signifikansi pengaruh akuntabilitas dan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

Dalam analisis pengolahan data, pengujian yang dilakukan meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas yang digunakan yaitu dengan menghitung korelasi antara skor setiap butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya. Pengujian ini menggunakan metode analisis *corrected item-total correlation*, dimana suatu instrument dikatakan valid jika koefisien korelasi r -hitung > koefisien korelasi r -tabel dengan tingkat signifikansi 0,05.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghozali (2005:42) uji realibilitas merupakan alat untuk mengukur sesuatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60.

c. Deskriptif Statistik

Membahas dan menganalisis data yang telah diperoleh dari kuesioner, setelah dilakukan pentabulasian dan selanjutnya dilakukan interpretasi dengan pendekatan deskriptif. Statistik deskriptif (*descriptive statistics*) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh dari penelitian, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014: 45).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk membuktikan apakah dalam model regresi variabel dependen serta independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang berdistribusi normal merupakan model regresi yang baik (Ghozali. 2005:42).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan untuk menguji korelasi antara variabel bebas (*independen*) dalam regresi (Ghozali, 2018). jika tidak terjadi korelasi antara variabel bebas maka merupakan model regresi yang baik. Untuk mengetahui multikolinearitas maka dapat dilihat nilai Tolerance dan Variance Influence Factor dari hasil perhitungan regresi berganda. Apabila nilai Tolerance > 0,10 serta nilai VIF < 10 maka bisa diartikan tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji ketidaksamaan varian dari residual mengenai satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik merupakan regresi yang bebas dari heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilihat dengan menggunakan Scatterplot Model. Analisis pada gambar scatterplot yang menyatakan model regresi linier tidak terdapat heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan teoritis ataupun hasil sementara dalam suatu penelitian. Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif (logika deduktif). Logika deduktif merupakan menganut atas asas koherensi, mengingat premis merupakan data yang bersumber dari pernyataan yang sudah selesai di uji kebenarannya, maka hipotesis yang dirumuskan akan memiliki derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dengan premis.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) berguna untuk mengenali seberapa besar persentase sumbangan dari variabel independen (pengaruh akuntabilitas dan pengawasan inten) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (pengelolaan keuangan BUMDes) bisa dilihat dari besarnya koefisien determinasi (R²). Di mana R² ataupun R Square menguraikan seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menentukan apakah variabel independen yang ada dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t -hitung dengan t -tabel. Untuk menentukan nilai t -tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dan 2 sisi dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah:

1. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka, H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Muhammad Mestone (2008:76) mengemukakan pengujian ini bertujuan untuk mengenali sebuah pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-tabel dengan F-hitung. Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degrees of freedom) $df_1 = \text{jumlah total variabel} - 1$ dan $df_2 = (n - k - 1)$ di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

1. Jika $F\text{ hitung} < F\text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Jika $F\text{ hitung} > F\text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas sebelum dilakukan pengujian hipotesis (Ghozali, 2018). Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan dilakukan penelitian ini.

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas residu dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi yang mensyaratkan residual nilai taksiran model regresi harus berdistribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil perhitungan uji normalitas residual dari persamaan taksiran yang diperoleh menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4357.25233408
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.052
	Negative	-.103
Test Statistic		.103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.097 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.490
Point Probability		.000

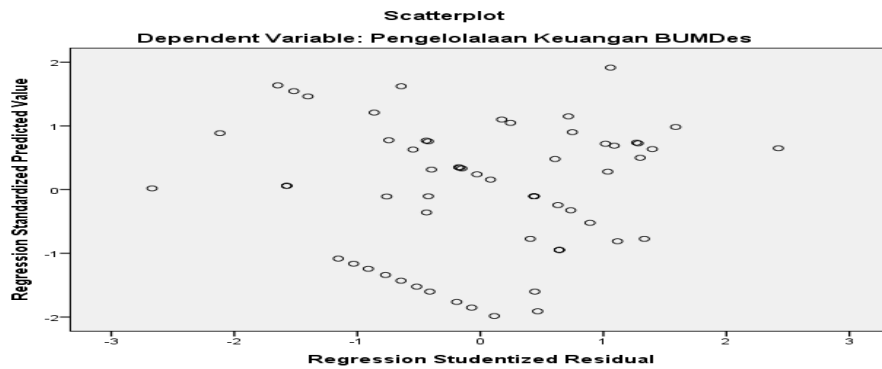
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai Exact. Sig. (2-tailed). Nilai ini dibandingkan dengan 0,05 (dalam kasus ini menggunakan taraf signifikansi atau $\alpha = 5\%$) untuk pengambilan keputusan dengan berpedoman pada nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ distribusi tidak normal sedangkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ distribusi data adalah normal. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh probabilitas Exact. Sig. (2-tailed) pada unstandardized residual sebesar 0,490 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini normal.

B. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dasar analisis ada tidaknya masalah heterokedastisitas adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).



Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan kondisi variabel independen dalam model regresi yang saling berkorelasi sempurna. Hal ini menjadikan persamaan regresi yang diperoleh tidak tepat dalam menjelaskan pengaruh X terhadap Y. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factors) antar variabel X dalam model regresi. Batasan nilai untuk variabel dikatakan berkolinearitas tinggi jika diperoleh nilai VIF untuk variabel independen lebih besar dari 10 sebagai berikut.

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Akuntabilitas	.794	1.259
Pengawasan Intern	.794	1.259

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan BUMDes

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai VIF (Variance Inflation Factors) kedua variabel lebih kecil dari 10, maka bisa disimpulkan bahwa antar variabel tidak terjadi multikolinearitas dan layak digunakan.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan BUMDes maka dilakukan perhitungan analisis regresi berganda. Hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS diperoleh koefisien regresi dan nilai konstanta seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Analisis Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-153.798	2917.436		-.053	.958
Akuntabilitas	.330	.140	.204	2.360	.022
Pengawasan Intern	.719	.090	.689	7.959	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan BUMDes

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes sebagai berikut:

$$Y = -153.798 + 0,330 X_1 + 0,719 X_2$$

Koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X_1) sebesar 0,330 menjelaskan besarnya perubahan skor Pengelolaan Keuangan BUMDes karena pengaruh dari Akuntabilitas. Tanda positif menunjukkan arah hubungan berbanding lurus (sejalan). Jadi pada saat ada kenaikan skor variabel Akuntabilitas maka skor Pengelolaan Keuangan BUMDes akan meningkat sebesar 0,330 dengan anggapan faktor yang lain konstan (tidak berubah). Jadi semakin baik Akuntabilitas maka Pengelolaan Keuangan BUMDes akan semakin baik.

Koefisien regresi variabel Pengawasan Intern (X_2) sebesar 0,719 menunjukkan besarnya perubahan Pengelolaan Keuangan BUMDes (Y) karena pengaruh variabel Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes. Tanda positif menunjukkan arah hubungan berbanding lurus (sejalan). Jadi pada saat ada kenaikan satu satuan skor variabel Pengawasan Intern maka skor Pengelolaan Keuangan BUMDes akan naik sebesar 0,719 dengan anggapan faktor yang lain konstan (tidak berubah). Jadi semakin baik Pengawasan Intern maka Pengelolaan Keuangan BUMDes akan meningkat dan semakin baik.

2. Uji Parsial (Uji T)

Untuk melihat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan BUMDes, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh dari Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

$H_a: \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh dari Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Penentuan hasil pengujian (Penerimaan/Penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai ttabel dengan taraf kesalahan 5% dan $df = n - k - 1 = 63 - 2 - 1 = 60$ adalah 1,671.

Hasil perhitungan statistik uji pada pengujian hipotesis dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.22
Hasil uji T untuk variabel Akuntabilitas

Hipotesis	t_{hitung}	Sig (p)	t_{tabel}	α	keputusan	Keterangan
$H_0: \beta_1 = 0$	2.360	0,022	1,671	5%	H_0 ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2022)

Hasil perhitungan menunjukkan t- hitung lebih besar dari nilai ttabel ($t = 2,360 > 1,671$), maka diperoleh hasil pengujian H_0 ditolak. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik (p-value) sebesar 0,022 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan (yang dapat bermakna) dari Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes.

Selanjutnya untuk melihat pengaruh Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh dari Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

$H_a: \beta_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh dari Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes.

Tabel 4.4
Hasil uji T untuk variabel Pengawasan Intern

Hipotesis	t_{hitung}	Sig (p)	t_{tabel}	α	keputusan	keterangan
$H_0 = 0$	7.959	0,000	1,671	5%	H_0 ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (2022)

Hasil perhitungan menunjukkan t- hitung lebih besar dari nilai ttabel ($t = 7,642 > 1,671$), maka diperoleh hasil pengujian H_0 ditolak. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik (p-value) sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan (yang dapat bermakna) dari Pengelolaan BUMDes terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes.

3. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk pengujian koefisien regresi secara keseluruhan untuk mengetahui keberartian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria signifikansi, jika F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} maka persamaan regresi ganda tersebut dinyatakan signifikan.

$H_{01}: \beta_1 = \beta_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari Akuntabilitas dan Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes.

$H_{a1}: \text{ada } \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari Akuntabilitas dan Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Nilai statistik uji F diperoleh dalam tabel Anova hasil SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2123598437.677	2	1061799218.838	54.122	.000 ^b
Residual	1177110169.974	60	19618502.833		
Total	3300708607.651	62			

a. Dependent Variable: Pengelolalaan Keuangan BUMDes

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Intern, Akuntabilitas

Hasil perhitungan menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 54,122 dengan signifikansi 0,000. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} . Dari tabel F diperoleh nilai F_{tabel} dengan $db_1 = 2$ dan $db_2 = 63 - 2 - 1 = 60$ sebesar 3,150.

Diperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($54,122 > 3,150$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama Akuntabilitas dan Pengawasan Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes.

4. Koefisien Determinasi

Untuk menguji model penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu, Ghazali (2011). Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai adjusted R^2 dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2018)

Tabel 4.6
Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.802 ^a	.643	.631	4429.278	1.567

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Intern, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolalaan Keuangan BUMDes

Jika dilihat dari tingkat hubungan Akuntabilitas dan Pengawasan Intern secara bersama-sama dengan pengelolaan Keuangan BUMDes masuk dalam kategori kuat (erat) dengan besar korelasi 0,802 atau 80,2%, sedangkan nilai R square (R^2) adalah 0,643 (64,3%) yang berarti bahwa sebesar 64,3% tingkat Pengelolaan Keuangan BUMDes yang terjadi dapat dijelaskan oleh variabel Akuntabilitas dan Pengawasan Intern sedangkan sisanya 35,7% dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya. Dengan kata lain, besarnya pengaruh akuntabilitas dan pengawasan

intern terhadap pengelolaan keuangan BUMDes adalah 64,3%, sedangkan sisanya 35,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model regresi ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data SPSS dan juga penelitian-penelitian terdahulu maka diperoleh pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Hasil pengujian statistik telah menunjukkan dukungan hipotesis yang telah dibangun, dimana hipotesis (H_a) dinyatakan Akuntabilitas yang diukur dengan 3 dimensi yaitu: Kejujuran dan Hukum, Kebijakan dan Program telah mempengaruhi Pengelolaan Keuangan BUMDes pada Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban mengenai pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada pemerintah Rahmah et al., (2021). Dalam hal ini, Kewajiban BUMDes sebagai agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan serta pelaporan dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan oleh masyarakat sebagai prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Sujarweni, 2016). Yang pada dasarnya Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran saja akan tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Galih (2018) oleh akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Implementasi hasil uji antara akuntabilitas dan teori stewardship memberi makna bahwa pemerintah sebagai agent (pimpinan) dan rakyat sebagai principle (yang dilayani) tentu harus mempertanggungjawabkan kepada BPD/DPRD meliputi rencana kinerja; pengukuran kinerja; evaluasi kinerja; dan analisis akuntabilitas kinerja. Dapat dilihat dari (1) Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan. (2) Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin. (3) Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.

2. Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Untuk dapat meningkatkan Pengelolaan Keuangan BUMDes yang ada di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango maka sangat dibutuhkan Pengawasan Intern yang terdiri dari dimensi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Sesuai dengan rekapitulasi jawaban dari responden terhadap pernyataan-pernyataan terkait variabel Pengawasan Intern ini masih masih termasuk dalam kategori cukup sehingga masih perlu dikembangkan lebih baik lagi. Besaran skor keseluruhan dari jawaban responden pada masing-masing dimensi dan indikator Pengawasan Intern pada BUMDes pada Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango belum dapat mencapai peresentase 100% yang diharapkan. Sehingga antara tingkat ideal yang diharapkan dengan kondisi aktual terdapat gap yang besar sehingga Pengawasan Intern belum mencapai tingkat yang ideal. Hal ini juga dikarenakan belum optimalnya pengawasan intern yang dapat disebabkan Belum optimalnya tanggungjawab para pengelola BUMDes dapat mempengaruhi pengendalian internal atas laporan keuangan BUMDes serta masih kurangnya pemantaun masyarakat dalam mengawasi pengelolaan usaha BUMDes. Kemampuan manusia yang menjalankan/mengoperasikan seluruh sistem, proses, dan prosedur di dalam suatu organisasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Junaidi, 2018).

3. Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Dari hasil perhitungan uji hipotesis (Uji f) diperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($54,122 > 3,150$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.. Sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama bahwa Akuntabilitas (X_1) dan Pengawasan Intern (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes (Y). Dengan demikian hipotesis ke tiga yaitu "Akuntabilitas dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes" diterima. yang artinya semakin baik Akuntabilitas dan Pengawasan Intern maka Pengelolaan Keuangan BUMDes juga akan semakin baik.

Setelah melakukan uji f kemudian untuk melihat besaran pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan Uji R Square yang kemudian

menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan BUMDes dapat dijelaskan oleh variabel Akuntabilitas dan Pengawasan Intern sebesar 64,3% sedangkan sisanya sebesar 35,7% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Pengaruh secara simultan sebesar 64.3% % tersebut termasuk dalam kategori berpengaruh kuat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes, artinya semakin baik penerapan akuntansi maka pengelolaan keuangan BUMDes juga akan semakin baik.
2. Penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes, artinya semakin baik sistem pengawasan intern maka pengelolaan keuangan BUMDes juga akan semakin baik.
3. Penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas dan pengawasan intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes, artinya semakin baik sistem pengendalian internal maka akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana juga akan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, W. (2018). Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Akruial Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Kep. Selayar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Apriliani, R., Nurhayati, N., & Purnama, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kuningan. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(2), 172–189.
- Fauziah, A. (2017). Implementasi Satuan Pengawasan Internal Dalam Penjaminan Mutu Pendidik Di Sma Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo (Issue 8.5.2017). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Humana, M. N. (2018). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Enterpreneurship Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No.6 Tahun 2014 (Vol. 2014, Issue 6). Universitas Islam Negeri.
- Junaidi. (2019). Sistem Pengawasan Intern Dalam Pembiayaan Pada Bank Bri Syariah Cabang Bengkulu SKRIPSI. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Koso, J., Ogotan, M., & Rully Mambo. (2018). Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik*, 51(4), 1–12.
- Lilis Saidah Napisah, & Cecep Taufiqurachman. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis Pengellaan Dana Desa Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidangkasih Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(11), 1–13.
- Sofyani, H., Ali, U., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah ...)*, 5(2), 325–359. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/29053>
- Titioka, B., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F., & Siahainenia, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(1), 197–216.
- Wicaksono, G. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Mertoyudan). Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Cooper dan Schindler. (2014). *Bussiners Research Method*. New York: McGraw-Hill
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: BP. UNDIP
- Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). Sistem Akuntansi. *Sistem Akuntansi*, 19, 323–340.
- Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2015